



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	4 (<i>empat</i>)
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN dan PT Biofarma (Persero)
Hari, Tanggal	:	Rabu, 20 Januari 2021
Pukul	:	13.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Faisol Riza, Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan mengenai: 1. Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Anggaran TA 2020, dan 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran TA 2021. 3. Pembahasan Pelaksanaan Pembelian Vaksin Covid 19
Hadir	:	1. orang dari 53 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN, Erick Thohir, 3. Direktur PT Biofarma (Persero), Honesti Basyir beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Biofarma (Persero) pada pukul 13.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 20 Januari 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian BUMN per 31 Desember 2020 sebesar Rp260.130.543.993 (*Dua Ratus Enam Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga rupiah*) atau sebesar 97,65% dari Pagu Anggaran 2020 sebesar Rp266.392.551.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan sesuai dengan DIPA Kementerian BUMN nomor SP DIPA-041.01.1.606538/2021 tanggal 23 November 2020 dan sebagaimana diubah dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2020 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, terhadap Anggaran awal Kementerian BUMN Tahun 2021 sebesar Rp244.827.483.000 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dilakukan penghematan menjadi Rp228.591.256.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - A. Pengelompokan Berdasarkan Program
 1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp153.931.844.000 (*Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 2. Program Pengembangan dan Pengawasan sebesar Rp74.659.412.000 (*Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
 - B. Pengelompokan Berdasarkan Jenis Belanja
 1. Belanja Pegawai sebesar Rp63.174.744.000 (*Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 2. Belanja Barang sebesar Rp145.905.291.000 (*Seratus Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
 3. Belanja Modal sebesar Rp19.511.221.000 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pengelompokan per jenis belanja tersebut menunggu proses revisi Anggaran untuk penghematan.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk merealisasikan pelaksanaan anggaran secara transparan, tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan prinsip *Good Governance* dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Menteri BUMN untuk memberi arahan dan kebijakan kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang masih memiliki *cashflow* yang baik agar menyelesaikan kewajibannya kepada pihak swasta sehingga dapat mengurangi dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT. Biofarma (Persero) untuk melaksanakan proses pendistribusian vaksin Covid-19 dengan tetap menjaga mutu dan keamanan berdasarkan standar protokol yang berlaku.

6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak lain agar memiliki data yang akurat terkait Covid-19 sehingga proses vaksinasi dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran dan meminimalisasi risiko penyebaran maupun imunitas penduduk seluruh warga Indonesia, termasuk mengupayakan percepatan vaksinasi bagi jamaah haji dan lingkungan yang beresiko tinggi sebagai langkah menekan penyebaran virus.
7. Untuk mengakselerasi cakupan jumlah orang yang diberikan vaksin, Komisi VI DPR RI mendukung adanya opsi untuk dilakukan vaksin mandiri, dengan catatan di bawah pengawasan Pemerintah, terkait data, harga dan pelaksanaan.
8. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT. Biofarma (Persero) untuk bekerjasama dengan Kementerian dan *stakeholder* terkait untuk mempercepat riset dan produksi Vaksin Merah Putih.
9. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk segera menyelesaikan *roadmap* BUMN 2021-2024 dan pembagian kluster BUMN.
10. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT. Biofarma (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD

**FAISOL RIZA
A-33**